



JEMSI:
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem
Informasi

E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916

<https://dinastirev.org/JEMSI> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Mekanisme Kesesuaian Kode Akun dan Kode Barang Milik Negara (BMN) Untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengelolaan Aset Negara

Aris Budi Kurniawan¹, Iwan Kurniawan Subagja², Azis Hakim³

¹Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, arisbeka@gmail.com

²Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, iwankurniawan@unkris.ac.id

³Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, dr_azishakin@yahoo.com

Corresponding Author: arisbeka@gmail.com

Abstract: *Accurate and transparent financial reporting is a critical aspect of government financial management. One of the key elements in this regard is the management of state-owned assets, which involves the alignment between account codes and State-Owned Goods (BMN) codes. Discrepancies between account codes and BMN codes can affect the accuracy of financial statements and hinder both transparency and the efficiency of asset management. Factors contributing to these discrepancies include differences in understanding, changes in asset capitalization thresholds, and improper treasury processes. Additionally, the frequent turnover of personnel involved in asset and budget management further exacerbates the issue. This study aims to examine the importance of aligning account codes with BMN codes in the preparation of accountable financial reports, as well as efforts to improve the efficiency of state asset management.*

Keywords: *Financial Reporting, State Asset Management, Misalignment of Account Codes and BMN Codes.*

Abstrak: Laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Salah satu elemen kunci dalam hal ini adalah pengelolaan aset negara, yang melibatkan keselarasan antara kode akun dan kode barang milik negara (BMN). Ketidaksesuaian antara kode akun dengan kode BMN dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan dan menghambat transparansi serta efisiensi pengelolaan aset. Faktor-faktor seperti perbedaan pemahaman, perubahan nilai minimal kapitalisasi aset, serta proses perbendaharaan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian tersebut. Selain itu, pergantian petugas yang terlibat dalam pengelolaan aset dan anggaran juga berkontribusi terhadap masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pentingnya keselarasan antara kode akun dan kode BMN dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta upaya untuk meningkatkan pengelolaan aset negara yang lebih efisien.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Pengelolaan Aset Negara, Ketidaksesuaian Kode Akun dengan Kode BMN.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahunan TA 2024 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan dan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).

Program RKA-K/L dan RKA-BUN yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan BUN untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (outcome) tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan fungsi BUN dimaksud serta visi dan misi Presiden. Sistem Informasi adalah sistem yang dibangun, dikelola, dan/ atau dikembangkan oleh Kementerian Keuangan guna memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan/ atau monitoring dan evaluasi anggaran yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara (PMK. 62 Tahun 2023). Belanja Berkualitas direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dari rangkaian transaksi tersebut dikonsolidasikan dalam sistem yang dibangun, dikelola, dan/ atau dikembangkan oleh Kementerian Keuangan guna memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan/ atau monitoring dan evaluasi anggaran yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara kedalam SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas (PMK. 62 Tahun 2023). Dalam Pelaksanaan anggaran terdapat belanja Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN yang merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PMK232/PMK0.2022).

Penyusunan Laporan Keuangan yang memadai merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan pemerintah. Salah satu aspek yang krusial dalam pengelolaan aset negara adalah keselarasan antara kode akun dan kode barang milik negara (BMN). Kode akun dan kode BMN yang saling terkait dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Perbedaan pemahaman dan rangkaian proses perbendaharaan dapat mempengaruhi kesesuaian antara kode akun dan kode barang milik negara (BMN). Perubahan batasan nilai minimal Nilai Kapitalisasi Aset yang mulai berlaku sejak tahun anggaran 2018 menyebabkan ketidaktepatan dalam penganggaran belanja modal maupun pencatatan aset. Pada saat pengalokasian anggaran, terdapat kemungkinan item jenis barang modal yang diestimasi dengan harga memenuhi nilai minimal kapitalisasi namun pada saat pelaksanaan anggaran tidak memenuhi nilai minimal kapitalisasi. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan referensi harga yang kurang tepat saat pengalokasian anggaran ataupun

karena adanya penurunan harga akibat proses pengadaan barang dan jasa. Pergantian petugas perbendaharaan, aset dan anggaran ikut berperan juga dalam kesalahan pencatatan aset maupun kode akun. Dukungan kebijakan melalui sosialisasi peraturan pada setiap kesempatan dalam bimbingan maupun rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan telah diterapkan. Makalah ini bertujuan sebagai bagian dari upaya yang lebih baik dalam pengelolaan aset negara yang lebih efisien, tetapi juga pada peningkatan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi mekanisme kesesuaian Kode Akun dan Kode Barang Milik Negara (BMN) untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan aset negara. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi laporan keuangan dan transparansi serta efisiensi pengelolaan aset. Berikut adalah rincian metode penelitian yang akan digunakan:

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah petugas/operator Sistem Akuntansi instansi/ SAI pada lingkup Direktorat jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, khususnya mereka yang terlibat dalam laporan keuangan, aset dan persediaan. Subjek dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu-individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung dalam pengelolaan arsip. Partisipan akan mencakup beberapa kategori:

- a. Pegawai yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, aset dan persediaan satuan kerja.
- b. Pimpinan/ Kepala Bagian/Koordinator/ yang memantau laporan keuangan, aset dan persediaan satuan kerja.
- c. Pegawai di bidang perencanaan anggaran dan program evaluasi.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

- a. Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penggunaan serta penyimpanan arsip. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai pentingnya laporan keuangan, laporan barang milik negara, laporan persediaan, manfaat laporan keuangan dalam pekerjaan mereka, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan laporan keuangan, dan saran untuk perbaikan;
- b. Observasi Partisipatif: Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan penyusunan laporan keuangan untuk mendapatkan gambaran riil mengenai bagaimana laporan keuangan disusun, termasuk proses rekonsiliasi, ketidaksesuaian akun dan akses informasi pencatatan data anggaran, aset, persediaan;
- c. Analisis Dokumen: Dokumen-dokumen terkait Laporan keuangan, seperti kebijakan, pedoman, dan prosedur laporan keuangan yang diterapkan di Eselon I tersebut, akan dianalisis untuk memahami bagaimana laporan keuangan diproses dan disusun. Dokumen-dokumen ini mencakup standar akuntansi pemerintah, kebijakan laporan keuangan, dan tata cara pengelolaan aset/ Barang milik negara dan persediaan.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan analisis dokumen. Pedoman wawancara akan memuat pertanyaan terbuka mengenai pandangan pegawai tentang pentingnya laporan keuangan, kendala yang dihadapi, dan manfaat laporan keuangan dalam mendukung transparansi dan efisiensi. Analisis dokumen digunakan untuk menganalisis sistem laporan keuangan yang berlaku, seperti cara pencatatan mutasi tambah dan mutasi kurang, dan

tingkat kemudahan akses aplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait pentingnya Mekanisme kesesuaian Kode Akun dan Kode Barang Milik Negara (BMN) di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang meliputi manfaat kesesuaian pencatatan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Hasil ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang dilakukan terhadap petugas sistem akuntansi instansi yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan.

Hasil Observasi

Tabel 1. Temuan Observasi:

No	Aktivitas yang Diamati	Temuan	Dampak Potensial	Saran/masukan
1	Input data BMN di SAKTI	Perbedaan pemahaman operator terkait Penggunaan kode akun tidak sesuai dengan kode barang	Laporan Keuangan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya; potensi audit finding	Mengadakan bimbingan penyusunan laporan keuangan.
2	Rekonsiliasi internal antara Aset dan GL	Selisih belanja modal dengan pencatatan aset	Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi	Diperlukan revisi anggaran, ralat Surat perintah membayar atau koreksi aset.
3	Penggunaan referensi kode barang	Tidak semua petugas menggunakan Katalog BMN sebagai acuan pemilihan kode barang	Pemilihan kode barang tidak konsisten	Diperlukan kebijakan dalam pencatatan BMN dan persediaan.
4	Monitoring oleh Pokja Evaluasi	Tidak semua kesalahan kode akun-kode barang ditindaklanjuti segera	Potensi kesalahan berulang	Diperlukan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan dan BMN.

Hasil Analisis Dokumen

Temuan dari Analisis Dokumen:

Berdasarkan analisis terhadap dokumen-dokumen seperti Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Peraturan Menteri Keuangan terkait klasifikasi akun belanja, serta output dari aplikasi SAKTI, Monsakti dan Omspan, ditemukan beberapa permasalahan utama:

- Ketidaksesuaian kode akun dan kode barang beberapa entri pengadaan menunjukkan ketidaksesuaian antara kode akun belanja modal (53xxx) dengan kode barang yang terdaftar sebagai persediaan atau belanja barang operasional (52xxxx). Contoh umum terjadi pada pengadaan peralatan komputer yang tercatat dengan akun dan barang yang tidak konsisten.
- Kurangnya referensi pemilihan kode barang petugas pencatat BMN sering tidak merujuk pada Katalog BMN dan hanya menggunakan pengetahuan sebelumnya, yang berdampak pada kesalahan klasifikasi aset.
- Lemahnya pengendalian internal tidak ada mekanisme validasi otomatis yang menghambat input ketika kode akun dan kode barang tidak sesuai, terutama di modul persediaan.
- Rekonsiliasi tidak rutin rekonsiliasi internal antara SAKTI modul GL) dan Aset tidak dilakukan secara berkala, menyebabkan ketidaksesuaian nilai aset pada laporan keuangan dan laporan BMN.

Hasil Wawancara dengan Pegawai

Temuan Wawancara:

Wawancara dilakukan terhadap pegawai bagian pengelolaan BMN, bendahara pengeluaran, dan anggota Pokja Evaluasi Pelaporan.

- a. Kurangnya pemahaman teknis sebagian besar pegawai mengakui kesulitan dalam memahami perbedaan teknis antara akun belanja barang dan akun belanja modal, terutama dalam konteks penetapan jenis aset tetap.
- b. Keterbatasan pelatihan pelatihan terkait klasifikasi akun dan barang masih jarang dilakukan dan bersifat terbatas pada pengguna utama, sehingga banyak pegawai operator belum memahami dasar pengkodean.
- c. Penggunaan SAKTI masih terdapat kesalahan teknis operator pada Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan,
- d. Keterlibatan pokja evaluasi pokja evaluasi mengakui bahwa mereka masih bersifat reaktif, yaitu melakukan koreksi saat audit atau saat diminta, bukan secara proaktif menganalisis data pengadaan setiap periode.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian antara kode akun dan kode barang dalam pengelolaan BMN masih terjadi secara signifikan, yang berdampak pada menurunnya akuntabilitas pelaporan aset negara.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kode akun dan kode Barang Milik Negara (BMN) merupakan persoalan sistemik yang masih banyak terjadi di berbagai instansi pemerintah. Ketidaksesuaian ini bukan hanya disebabkan oleh kesalahan teknis, namun juga oleh kurangnya pemahaman pegawai, minimnya pelatihan, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset negara.

Dampaknya cukup signifikan, mulai dari ketidakakuratan laporan keuangan, kendala dalam proses audit dan evaluasi aset, hingga menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Penyusunan dan implementasi standar dan pedoman teknis yang jelas dan mengikat terkait relasi antara kode akun dan kode BMN;
- b. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital untuk mendeteksi dan mencegah ketidaksesuaian sejak awal;
- c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan program sertifikasi bagi petugas pengelola BMN dan keuangan.
- d. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan aset negara yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat fondasi pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing public expenditure: A reference book for transition countries*. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD).
- Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis kesuksesan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1).
- Biswan, A. T., & Falaqi, F. (2018). Praktik akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 39–63.
- Christian, F. (2019). Analisis penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Merauke. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications, Inc.

- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- DJA. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Angka Dasar Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016*. Kementerian Keuangan.
- Fitrianty, D., & Biswan, A. T. (2018). Praktik sistem penganggaran melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1), 34–46.
- Harnowo, S., Santoso, B., & Suryani, E. (2021). Determinan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Pendekatan human-organization-technology (HOT) fit framework. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 76–9.
- Kementerian Keuangan RI. (2016a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan RI. (2016b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan RI. (2018a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan RI. (2018b). *Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran*. Kementerian Keuangan.
- KSAP. (2014). *Buletin Teknis Nomor 15 tentang Aset Tetap Berbasis Akrual*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mardiasmo, D. (2009). *Akuntansi sektor publik*. ANDI.
- McNichol, E., & Grundman, D. (2011). *The current services baseline: A tool for understanding budget choices*. Center on Budget and Policy Priorities.
- Mukhtaromin. (2018). Kepuasan pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Nasrudin, E., & Widagdo, A. K. (2020). Determinan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Dan Pengaruhnya Terhadap Individu Dan Organisasi. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1, 69–94.
- Nugroho, H. P., & Lestyowati, J. (2020). Analisis tingkat kepuasan dan kepentingan pengguna aplikasi SAKTI dengan PIECES framework. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2).
- Pambudi, K. H., & Adam, H. (2018). Analisis dimensi kesuksesan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja wilayah provinsi Jawa Timur dengan pendekatan DeLone and McLean Information System Success Model. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(2).
- Pambudi, Y. A., Safuan, & Alhabshy, M. A. (2022). Implementasi penggunaan aplikasi SAKTI pada penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Perbendaharaan, D. (2018a). *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar*. DJPB – Kementerian Keuangan.

- Perbendaharaan, D. (2018b). *Surat No. S-7439/PB/2018 tanggal 26 September 2018 hal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2018*. DJPB – Kementerian Keuangan.
- Prabowo, N. T. (2017). Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Indonesian Treasury Review*, 2(2), 55–66.
- Prasetyo, D. (2019). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna dan manfaat bersih atas implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi pada kantor*.